



BULETIN PARLEMENTARIA

NOMOR 899/III/III/2016



PENYANDANG DISABILITAS

HARUS PUNYA TEMPAT LAYAK UNTUK BEREKSPRESI



DPR BERKOMITMEN
PRODUKTIF
HASILKAN UU



PEMROV JAMBI
MINTA DUKUNGAN
KOMISI VIII DPR



PANSUS DPR DORONG
KPK USUT KASUS
PELINDO II



Wakil Ketua DPR Fadli Zon

PENYANDANG DISABILITAS HARUS PUNYA TEMPAT LAYAK UNTUK BEREKSPRESI

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, bahwa penyandang disabilitas harus memiliki wadah yang layak untuk tampil di muka publik terutama untuk berekspresi. Fadli mendorong agar RUU disabilitas benar-benar disahkan pada periode ini.

Para penyandang disabilitas harus punya tempat yang layak untuk mengekspresikan kemampuan yang mereka miliki di hadapan publik, termasuk juga di gedung DPR. Kita berharap di masa sidang yang akan datang, UU bisa disahkan," tambah Fadli disela-sela acara pembukaan Pameran Lukisan, Pentas Seni dan Seminar Nasional dalam rangka mendorong disahkannya RUU Disabilitas di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (14/3/2016).

Politisi Gerindra ini juga memberikan apresiasi dan dukungan kepada penyandang disabilitas agar dapat terus berkarya dan berkeaktifitas, meskipun dalam kondisi keterbatasan. Para penyandang disabilitas perlu mendapat perhatian atas karya-karyanya, seperti yang tampak dalam acara pameran lukisan itu. Ada penyandang disabilitas yang melukis dengan menggunakan mulut dan dengan kaki. Setidaknya data menunjukkan 11,5 juta penyandang

disabilitas di usia produktif juga dihimbaunya perlu mendapat dukungan.

Dalam kesempatan itu hadir pula Duta Besar Aljazair Abdelkader Aziria, yang mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Parlemen Indonesia yang sudah mengundangnya untuk hadir ke event tersebut. Dan dia juga berharap hal ini dapat menjadi contoh yang baik kepada negara lain dalam mensosialisasikan para penyandang disabilitas.

dep, rfm, mp, foto : rumi/hr



KETUA DPR BELI LUKISAN PRESIDEN JOKOWI KARYA PENYANDANG DISABILITAS



Pimpinan DPR bersama pelukis disabilitas

Pameran lukisan penyandang disabilitas yang digelar di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Jakarta, mendapat apresiasi dari Ketua DPR RI Ade Komarudin.

Dalam kesempatan itu Akom membeli dua buah lukisan, lukisan pertama bertema satwa "macan" seharga Rp 30 juta, dan yang kedua lukisan wajah Presiden Joko Widodo, seharga Rp 2,5 juta hasil karya dari pelukis disabilitas bernama Rodhi.

Lukisan wajah Jokowi itu rencananya akan diberikan kepada Presiden Joko Widodo, sebagai kado istimewa atas kelahiran cucu pertamanya. "Ini hadiah buat cucu Jokowi, dan sekaligus sebagai ucapan selamat karena Jokowi sudah jadi Kakek," ujar Akom digedung DPR, Senayan, Senin (14/03/2016).

Pameran lukisan yang diadakan ini bertujuan untuk mendukung RUU Disabilitas. Aspek humanis dari penyelenggaraan pameran lukisan dari

para pelukis disabilitas, menjadi bahan perenungan sekaligus penyadaran bahwa manusia terlahir sebagai makhluk yang serba terbatas, karena kodratnya yang jauh dari sempurna.

Terkait dengan dukungan bagi kehidupan penyandang disabilitas, pemerintah dan DPR RI saat ini sudah sependapat soal draf Rancangan Undang-Undang Penyandang Disabilitas.

Oleh karena itu melalui kegiatan diskusi panel dan pameran pelukis Disabilitas yang diprakarsai oleh DPR RI, akan terus mendorong pemerintah untuk segera menindaklanjuti RUU Disabilitas yang telah diinisiasi oleh DPR, agar segera menjadi UU Disabilitas, dan dapat lebih menjamin kehidupan para penyandang disabilitas untuk lebih berkualitas.

dep_rmm.mp_foto:un/1/hr

PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR-RI

PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH

Dr. Winantuningtyastuti, M.Si
(Sekretaris Jenderal DPR-RI)

WAKIL KETUA PENGARAH

Dra. Damayanti, M.Si,
(DEPUTI PERSIDANGAN)

PIMPINAN REDAKSI

Drs.Suratna, M.Si
(Kabag Media Cetak & Media Sosial)

WK. PIMPINAN REDAKSI

Dra. Tri Hastuti
(Kasubag Media Cetak)

REDAKTUR

Mastur Prantono, Nita Juwita, S.Sos

SEKRETARIS REDAKSI

Suciati, S.Sos

ANGGOTA REDAKSI

Agung Sulistiono, SH,
Rahayu Setiowati, Muhammad Husen,
Sofyan Efendi, Virgianne Meiske Patuli,
Devi Iriandi, Hendra Sunandar,
Surahmad Eko, Ria Nur Mega

REDAKTUR FOTO

Eka Hindra, Iwan Armanias

FOTOGRAFER

Rizka Arianindya, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah,
Andi M.Illham, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati,
Jayadi Maulana, Arief Rachman,
R. Kresno P.D Moempoeni, Azka Restu Fadilah

ADMINISTRASI FOTO

Hasri Mentari

SIRKULASI

Bagus Mudjiharjanto

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA

Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI

Gedung Nusantara II Lt. 3

Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta

Telp. (021) 5715348, 5715350

Fax. (021) 5715341,

e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com

www.dpr.go.id/berita

PENERBITAN & DISTRIBUSI

PIMPINAN PENERBITAN

Djustiawan Widjaya, S.Sos. M.AP
(Kabag Penerbitan)

WK. PIMPINAN PENERBITAN

Mediantoro, SE
(Kasubag Produksi),
Pesta Evaria Simbolon, SE. M.Si
(Kasubag Distribusi)

Telp. 021-571 5697

Fax. 021-571 5421

Email

penerbitandpr@gmail.com

*(isi berita dan materi foto
diluar tanggung jawab Bagian Penerbitan)*



DPR BERKOMITMEN PRODUKTIF HASILKAN UU

Ketua DPR RI Ade Komarudin menegaskan, akan berkomitmen untuk produktif dalam menghasilkan Undang-undang. Usai rapat evaluasi pembahasan Rancangan undang-undang (RUU) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) periode 2015-2019, orang nomor 1 di DPR itu melaporkan selama Masa Persidangan III Tahun Sidang 2015/2016, ada enam Undang-undang yang telah disahkan.

"Saya sudah berkomitmen dengan seluruh Pimpinan Dewan, kita harus produktif dalam memproduksi UU. Kerja kita ditunggu oleh rakyat, dan kita harus memberikan hasil kerja kepada seluruh rakyat Indonesia," kata Akom, panggilan akrab Ade Komarudin saat menggelar



Ketua DPR Ade Komarudin

konferensi pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (15/3/2016).

Keenam undang-undang tersebut terdiri atas empat undang-undang dan dua undang-undang kumulatif terbuka. Undang-undang itu adalah Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera); Undang-Undang Perlindungan

dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam; Undang-Undang Penyandang Disabilitas; serta Undang-Undang Pencegahan dan Penanggulangan Krisis Keuangan.

Adapun undang-undang kumulatif terbuka terdiri atas RUU Pengesahan Kerja Sama antara Kementerian Pertahanan RI dan Kementerian Pertahanan Jerman mengenai kerja sama di bidang pertahanan dan RUU tentang Pengesahan Persetujuan Pemerintah RI dan Pemerintah Cina tentang aktivitas di bidang pertahanan.

Politisi F-PG itu juga akan terus berkomitmen meningkatkan produktivitasnya dalam masa persidangan mendatang. Hasil yang dicapai dalam Masa Persidangan III ini merupakan hasil maksimal dari seluruh anggota Dewan dalam menjalankan tugas.

"Dalam Masa Persidangan ke IV mendatang ini, kami sudah lakukan evaluasi, Insya Allah akan produktif juga menghasilkan UU," komitmen politisi asal dapil Jawa Barat itu.

st. foto: azka, emo/hr

KETUA DPR TERIMA DELEGASI DEWAN FEDERASI MAJELIS RUSIA

Ketua DPR Ade Komarudin menerima kunjungan Wakil Pertama Ketua Dewan Federasi Majelis Rusia Nikolay V. Fedorov dan rombongan di Ruang Delegasi Ketua DPR RI, Gedung DPR, Senayan, Senin (14/3/2016).

"Tadi kita bicara mengenai hubungan antara Indonesia dan Rusia, hubungan ini sangat penting dan perlu didorong guna meningkatkan kerjasama yang saling membutuhkan antar dua negara, baik dibidang teknologi, perdagangan, politik

dan kesehatan," kata Ade Komarudin.

Sementara itu, anggota DPR Dave Akbarshah yang juga turut serta dalam pertemuan tersebut menjelaskan, hubungan Indonesia dengan Rusia sudah sangat kuat, dan dirinya berharap untuk terus diperkokoh dengan lebih meningkatkan kerjasama baik

melalui pelatihan militer, ikatan pembelian persenjataan, sosial politik serta dibidang pendidikan.

"Khusus dalam peningkatan hubungan dagang dalam bidang persenjataan, ini menjadi sangat penting karena merupakan salah satu dari program prioritas pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kemampuan persenjataan kita" terang politisi dari Partai Golkar itu.

Selain Dave, anggota DPR dari Fraksi PPP Okky Asokawati menyampaikan, bahwa draf kerjasama mengenai kesehatan yang belum terselesaikan antara negara Rusia dan Indonesia akan dikawal olehnya saat Komisi IX raker dengan Menkes nanti.

"Adanya draf kerjasama yang belum terselesaikan antara negara Rusia dan Republik Indonesia dan saya menyoroti hal



INDONESIA-JEPANG TERUS TINGKATKAN HUBUNGAN BILATERAL

Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan kemitraan yang strategis dengan Jepang. Kerjasama Indonesia-Jepang sudah terjalin begitu lama dan harus dikembangkan. Demikian ditegaskan Ketua DPR Ade Komarudin ketika menerima kunjungan kehormatan Dubes Jepang Yasuaki Tanizaki di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (15/3/2016).

Dikemukakan Akom, sapaan akrab Ade Komarudin, pertemuan ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk terus membangun hubungan bilateral Indonesia-Jepang. "Terima kasih atas kunjungan ini dan kami apresiasi niat baiknya. Semoga ini akan menjadi momentum untuk terus tingkatkan kerjasama," ujar Akom didampingi anggota DPR Aryo Djojohadikusumo, Suryo Alam dan Nurhayati Ali Assegaf.

Jepang, lanjut Pimpinan Dewan dari FPG ini, sudah menanamkan investasi dengan nilai sangat tinggi terutama dalam bidang industri dan manufacturing, begitupun dalam infrastruktur. Investasi tersebut berdampak positif bagi masyarakat Indonesia dengan terciptanya

lapangan kerja. Berdasarkan survey, perusahaan Jepang telah menciptakan 1 juta lapangan kerja di Indonesia.

Selain itu, jumlah wisatawan Indonesia yang berkunjung ke Jepang bertambah sebanyak 30 persen atau sekitar 200 ribu orang, sebaliknya wisatawan Jepang yang masuk ke Indonesia sekitar 500 ribu orang setelah diberlakukannya kebijakan bebas visa per Januari 2015 lalu.

"Saya melihat banyak peluang kerjasama termasuk *energy* dan *human resources*. Di bidang kereta, Jepang melakukan konstruksi MRT yang akan diselesaikan sesuai jadwal," ujar Yasuaki Tanizaki.

Dalam kesempatan tersebut, Anggota Komisi IV Suryo Alam turut menyampaikan agar Indonesia-Jepang bisa meningkatkan



Ketua DPR Ade Komarudin dan Pimpinan serta Anggota BKSAP menerima Dubes Jepang

hubungan muatualismenya dalam bidang maritim terutama perikanan mengingat makanan pokok masyarakat Jepang adalah ikan, dan Indonesia merupakan gudang ikan.

"Potensi ikan di Indonesia membuat Jepang tertarik untuk kerjasama dan ini peluang bagus untuk negara Jepang yang tahu caranya bagaimana mengelolah ikan yang sudah dibawa ke darat agar tetap segar dan bisa diekspor," ujar Suryo usai pertemuan tersebut.

ann.mp. foto: eno, azka/hr



Ketua DPR Ade Komarudin Terima Delegasi Dewan Federasi Majelis Rusia

itu, karena memang negara kami khususnya Kemenkes sedang membangun infrastruktur kesehatan yang lebih baik lagi dimasa-masa mendatang. Jadi insya Allah nanti ketika komisi IX rapat kerja dengan menteri kesehatan saya akan mengawal dan saya akan mencoba untuk mendalami hal tersebut", ungkapnya yang ikut serta mendampingi Ketua DPR bertemu delegasi Rusia itu.

Dalam pertemuan, Wakil Pertama Ketua Dewan Federasi Majelis Rusia Nikolay V. Fedorov, berharap pada Mei mendatang Presiden Indonesia akan bertemu dengan pemimpin Rusia menjelang KTT Asean-Rusia. Pihak Rusia dan Indonesia telah menyiapkan draft MoU yang akan ditandatangani pemimpin kedua negara.

Selain Dave dan Okky hadir pula dalam pertemuan Wakil Ketua Komisi VI Azam Azman Natawijana dari Fraksi Partai Demokrat, dan dari Sekretariat DPR dihadiri oleh Deputi Persidangan Damayanti.

mm.nt. foto:rumi/hr.



PERANGKO TUNJUKKAN IDENTITAS DAN EKSISTENSI NEGARA

Perangko adalah benda berharga disamping fungsi utamanya sebagai tanda pelunasan porto dan biaya pos, juga merupakan wahana untuk menyampaikan pesan mengenai berbagai kepentingan masyarakat, termasuk carik kenangan bendapos bercetakan perangko.



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima Perkumpulan Filateli Indonesia

Menurut Wakil Ketua DPR RI bidang Politik dan Keamanan Fadli Zon, perangko juga merupakan salah satu bentuk dalam menunjukkan identitas dan eksistensi sebuah bangsa.

"Perangko ini adalah menunjukkan identitas sebuah bangsa dan negara serta bagian dari eksistensi sebuah negara," kata Fadli Zon, usai menerima Perkumpulan Filateli Indonesia, di Gedung DPR RI, Kamis (10/2).

Politisi Partai Gerindra menjelaskan bahwa pada waktu Indonesia mempertahankan kemerdekaan juga membuat perangko-perangko. Waktu itu perangko yang dibuat di Amerika sebagai propaganda Indonesia di tahun 1947, 1948, dan 1949 yang dibuat perwakilan kita di PBB. "Perangko ini adalah bagian dari eksistensi sebuah

negara waktu itu," jelasnya.

Lebih lanjut, Fadli mengutarakan bahwa perkumpulan filateli ini berdiri hampir 94 tahun yang lalu. Perkumpulan filateli ini sering mengadakan pameran dan kompetisi perangko Internasional, yang akan datang dilaksanakan di Bandung bulan Agustus 2017. Dan diharapkan akan dihadiri puluhan peserta dari berbagai negara.

"Saya sendiri salah seorang Pembina perkumpulan filateli Indonesia, ikut mendukung perangko. Perangko ini adalah identitas sebuah bangsa dan negara," tegasnya. Tidak bisa dipungkiri, perkembangan teknologi surat elektronik nyatanya telah menjadikan surat menyurat tradisional mulai ditinggalkan masyarakat. Kondisi itu lambat laun memengaruhi penggunaan perangko (filateli) di Indonesia.

"Sekarang memang sudah banyak kemajuan teknologi yang membuat orang jarang berkirim surat menggunakan perangko. Tapi perangko sebagai hobi itu tidak pernah lepas dengan peminat yang masih banyak. Bahwa hobi mengoleksi perangko ini adalah *king of hobby and hobby is the king*," katanya.

as. foto : runi/hr.

FADLI ZON MENGENANG KONSEPTOR PEREKONOMIAN BANGSA

Tepat 36 tahun silam, bangsa Indonesia kehilangan salah satu proklamator kemerdekaannya.

Mohammad Athar atau lebih dikenal dengan Bung Hatta merupakan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia yang bersama Presiden pertama Ir. Soekarno membacakan Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945. Ia juga dikenal sebagai sosok pemimpin yang jujur, sederhana dan cinta tanah air.

"Kedatangan saya kesini untuk memberikan penghormatan kepada Bung Hatta dan ini bukan pertama kalinya. Seperti kita tahu, Bung Hatta juga seorang tokoh atau bapak ekonomi kerakyatan," ungkap Wakil Ketua DPR Fadli Zon saat berziarah ke pusara Bung Hatta di TPU Tanah Kusir, Jakarta, Senin (14/03) petang.



DPR TEKANKAN KEWASPADAAN PADA DAERAH BUKAN RAWAN BENCANA



Tim Komisi VIII DPR meninjau jalan terputus karena banjir

Banjir besar yang melanda Pulau Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Senin-Selasa (8-9) Februari lalu merupakan tugas berat bagi BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat. Pulau Bangka yang bukan merupakan wilayah rawan bencana kini harus mendapat perhatian khusus.

"Dalam rapat dengan BNPB di DPR disampaikan bahwa Bangka Belitung ini tidak termasuk dalam peta rawan bencana,

jadi sekarang apa kemudian Babel ini dimasukkan ke peta rawan bencana untuk kemudian hari sebagai antisipasi," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa Amaliah selaku Ketua Tim Kunker Komisi VIII di Kantor BPBD Babel, Pangkalpinang, Kamis (10/3).

B P B D h a r u s meningkatkan lagi kewaspadaan dan melakukan upaya antisipasi dini bencana

alam bersama institusi pemerintah dan berbagai pihak yang lain.

"BNPB atau BPBD memang kebagian bersih-bersihnya tapi rehabilitasi dan rekonstruksi itu secara umum akan melekat pada bidang masing-masing seperti Kementerian Pekerjaan Umum. Kalau kemudian tidak punya sudut pandang penanggulangan bencana sejak awal, nanti penyelesaian tidak dapat menyeluruh," ujar Ledia.

Menelaah dari berbagai kunker Komisi VIII di berbagai daerah lain, Ledia

menyesalkan adanya pembangunan infrastruktur yang diperlukan di daerah bencana seperti kanal banjir dan lahar yang tidak dikerjakan secara tertata tuntas, padahal hal ini berguna di masa mendatang.

"Berdasarkan siklus perubahan cuaca diperkirakan 30 tahun ke depan daerah kepulauan akan terjadi bencana banjir, abrasi dan bencana lainnya yang cukup besar, karena meningkatnya ketinggian air laut, hal di masa depan seperti inilah yang harus diwaspadai" ujarnya lagi.

Sementara itu, Kepala BPBD Kepulauan Babel Najamuddin menyiagakan seluruh personil untuk mengantisipasi bencana banjir, angin puting beliung, kecelakaan kapal dan bencana alam lainnya.

"Kita terus melakukan berbagai upaya antisipasi dini, misalnya sosialisasi, pelatihan siaga bencana masyarakat, membentuk desa siaga bencana, pemasangan papan peringatan bencana di daerah titik-titik rawan bencana," untkannya.

Selanjutnya dalam kesempatan kunjungan kerja ini, Tim Komisi VIII meninjau kanal air dan beberapa titik kerusakan yang masih dalam proses rehabilitasi pembangunan di beberapa daerah di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka.

Menurutnya, terdapat berbagai falsafah atau pemikiran yang bisa diteladani dari mending Bung Hatta. Diantaranya, gagasan ekonomi, dengan adanya turut campur tangan pemerintah, sehingga menjadi ideologi bangsa seperti terumuskan dalam Pasal 33 Undang - Undang Dasar (UUD) Tahun 1945.

Salah satunya ayat 4 berbunyi: Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

"Ada banyak sekali warisan luar biasa dari Bung Hatta, pemikiran yang pada waktu itu jauh melampaui zamannya dan hingga sekarang masih relevan. Bukan

ekonomi komando ala sosialis atau komunis, bukan juga ekonomi liberal kapitalistik seperti di Amerika Serikat," ujar politisi Gerindra ini.

Sebagaimana diketahui, pemikiran Bung Hatta sangat mengedepankan kepentingan masyarakat tetapi hak dan martabat individu tetap harus dilindungi dan dihargai, sehingga kepentingan dan kemakmuran rakyat harus diutamakan tanpa mengabaikan hak perorangan.

"Bung Hatta berhasil

merumuskan sendiri ekonomi Indonesia sesuai dengan budaya bangsa, dan jika dilaksanakan saya yakin ini menjadi salah satu jalan menuju kemakmuran." ujar Fadli Zon mengenang sang konseptor perekonomian bangsa Indonesia.



Wakil Ketua DPR Fadli Zon saat berziarah ke Pusara Bung Hatta

ran. foto : rtska/hr.

ann.mp. foto:hamdis/hr.



PARIPURNA TETAPKAN RUU KARANTINA HEWAN SEBAGAI RUU INISIATIF DPR

DPR RI telah menetapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan menjadi RUU usul inisiatif DPR, selanjutnya akan dibahas antara Komisi IV DPR membidangi bidang pertanian, pangan, maritim, dan kehutanan bersama Pemerintah.

Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron mengatakan bahwa karantina ke depan menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Pemerintah akan bisa sejalan dengan penyempurnaan-penyempurnaan yang sudah diusulkan melalui usul inisiatif DPR tersebut.

"DPR menunggu Ampres (Amanat Presiden), kemudian membahasnya sesuai dengan inisiatif. Apa yang akan menjadi bagian penting bagi pemerintah akan dituangkan dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Pemerintah. Target penyelesaian ini, saya kira mengalir saja, kalau inginnya cepat, satu atau dua masa sidang bisa selesai," kata Herman Khaeron, usai menyerahkan pendapat Fraksi Demokrat terhadap RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan

kepada Sidang Paripurna DPR, Senin (15/3/2016).

Menurut Herman, hal-hal yang sangat urgent diatur dalam RUU ini, pertama adalah posisi karantina berada di depan Kepabeanaan. Sebelum barang yang berkaitan dengan hewan, tumbuhan dan ikan masuk ke dalam negeri harus melalui karantina terlebih dahulu.

"Seluruh barang yang berkaitan dengan hewan, tumbuhan dan ikan akan terseleksi dahulu sebelum masuk kepabeanaan. Jadi berada di prond border line, ada di depan," jelasnya.

Kedua adalah, karantina diberikan kewenangan melakukan penyidikan dan penyelidikan atas barang yang sudah masuk ke dalam negeri. jika berindikasi mengandung unsur-unsur yang membahayakan terhadap keberlangsungan genetik Indonesia atau keberlangsungan terhadap tumbuhan, hewan dan ikan di Indonesia, baik dari sebaran penyakit maupun hal-hal lainnya.

Yang ketiga adalah karena ada karantina bidang hewan,

bidang tumbuhan dan bidang ikan, tentu harus berada satu atap. Ini yang mengintegrasikan dari beberapa Tugas, Pokok, dan Fungsi (Tupoksi) yang berada di tiga kementerian tersebut, yaitu Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, dan kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Nah bagaimana dalam satu atapnya, kami (DPR RI) mengusulkan Badan Karantina menjadi badan tersendiri, dibawah dan bertanggungjawab kepada presiden," jelasnya.

Kalau ini sudah terjadi, Herman Khaeron meyakini Badan Karantina menjadi badan yang kuat, bisa menangkal berbagai potensi penyakit yang masuk ke dalam negeri. Pada sisi lain juga bisa memberikan jaminan berbagai barang yang keluar dari dalam negeri ke luar negeri bebas dari berbagai

penyakit dan unsur yang membahayakan masyarakat internasional.

as. foto: iwan /w.



Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron

TAIWAN AJAK INDONESIA KERJASAMA BIDANG PERTANIAN

Wakil Ketua DPR RI bidang Politik dan Keamanan Fadli Zon menerima The Taipei Economic and Trade Office (TETO) Chang Liang Jen, dalam rangka menjalin kerjasama bidang pertanian.

"Mengundang untuk kerjasama kegiatan pertanian antara Taiwan dengan Indonesia dan melihat perkembangan pertanian di negara itu serta menjajaki kerjasama antara petani Indonesia dan Taiwan," kata



Wakil Ketua DPR Fadli Zon menerima The Taipei Economic and Trade Office (TETO) Chang Liang Jen

Fadli Zon, di Gedung DPR RI, Kamis (10/3/2016).

Disamping itu, menurut politisi partai Gerindra ini, di Taiwan banyak sekali masyarakat asal Indonesia yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

"Kehidupan mereka menurut keterangan kepala perwakilan Taiwan di sini, itu lebih baik ketimbang di negara-negara lain," ungkapnya.

Selain itu, Fadli menerangkan bahwa Indonesia menganut *one china policy*, tetapi harus diakui juga Taiwan adalah sebuah entitas yang eksis, masalah politik internasional ada yang menanganinya. Namun kita juga perlu melihat juga kondisi masyarakat Indonesia yang berada di sana.

as. foto: jala /hr.



ANGKUTAN ONLINE HARUS DIBERI KEPASTIAN HUKUM

Anggota Komisi VI DPR Tifatul Sembiring mengatakan bahwa adanya tuntutan kepada pemerintah untuk menertibkan angkutan online dikarenakan tidak adanya kepastian hukum untuk mereka.

"Inikan tidak ada kepastian hukum, kepastian hukum tuh harus ada, ini harus ada solusinya," kata Tifatul kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (15/3), ketika dimintai komentarnya mengenai demo ribuan supir taksi, bus kota dan Bajaj yang tergabung dalam Persatuan Pengemudi Angkutan Darat (PPAD).

Selain itu, menurut Tifatul, para pengemudi angkutan berbasis online juga tidak boleh kehilangan pekerjaan, dirinya menilai pemerintah terlambat mengantisipasi kemajuan persaingan usaha, khususnya dalam usaha berbasis Informasi Teknologi Elektronik (ITE).

"Ya dari awal kan sudah berkembang, itu diantisipasi, jangan menteri ngomong lain, presiden ngomong lain pula. Dulu Menteri Perhubungan melarang tiba-tiba presiden membolehkan, sekarang mau

dilarang lagi," keluh Tifatul.

Menanggapi soal angkutan berbasis aplikasi, yang tak memiliki izin usaha transportasi, Tifatul menyarankan untuk mengembalikan hal tersebut pada peraturan pemerintah yang berlaku. Selain itu menurutnya, perlu ada pengkajian.

"Perlu mengkaji kembali aplikasi layanan transportasi seperti grab, uber dan gojek apakah sah secara hukum yang berlaku. Kalaupun tidak sah harus dicari jalan keluarnya," jelas Tifatul.

Politisi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini, juga menyarankan angkutan umum konvensional, yang belum menggunakan teknologi informasi elektronik untuk berbenah diri, baik secara fasilitas kendaraan dan pelayanannya, pasalnya masyarakat juga mengharapkan angkutan umum yang modern dan efektif.



Anggota Komisi VI DPR Tifatul Sembiring

"Kenapa mereka tidak menggunakan sistem online, di era digital ekonomi orang harus berinteraksi secara online, kalau tidak nanti dilibas oleh persaingan usaha," papar Menteri Komunikasi dan Informatika Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini.

Dia juga menyarankan, agar nanti sewaktu pembahasan revisi Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik (ITE) hal ini harus menjadi bahan acuan.

Komentar yang dilontarkan Tifatul, terkait dengan ruang lingkup kerja Komisi VI, mengenai industri dan persaingan usaha.

Seperti diketahui, pada Senin, (14/3) kemarin, ribuan sopir taksi, buskota dan bajaj berkumpul di Lapangan Monumen Nasional. Mereka membawa spanduk dengan berbagai tulisan yang isinya agar transportasi berbasis layanan aplikasi dihentikan.

elo.nt. foto: anief/hr.

KOMISI II BENTUK TIM BERSAMA SELESAIKAN KASUS TANAH

Seiring melonjak kasus-kasus pertanahan dan pengaduan masyarakat, Komisi II dalam melaksanakan fungsi pengawasan bersepakat membentuk tim bersama dalam memecahkan permasalahan kasus-kasus pertanahan.

Menurut Anggota Komisi II DPR Dadang Mochtar, pembentukan tim bersama penyelesaian kasus-kasus tanah karena sengketa tanah masih banyak, baik pemerintah dengan masyarakat maupun masyarakat dengan pengusaha.

"Kalau pakai jalur hukum pasti rakyat yang di bawah akan kalah, baik melawan pemerintah atau pengusaha. Untuk itu pemerintah dan Komisi II duduk bersama untuk memediasi hal tersebut," ujarnya di



Suasana RDP Komisi II DPR membahas kasus pertanahan

sela RDP/RDPU dengan Kepala Staf TNI AU, Dirjen Penanganan Agraria dan Pemanfaatan Tata Ruang Kementerian ATR/BPN dan Walikota Medan yang membahas penyelesaian kasus pertanahan Sari Rajo, Polonia, Medan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/03).

Menurut politisi Golkar tersebut, Komisi

II melakukan berbagai cara mengeksekusi permasalahan tanah yang ada dengan mencari data secara bersama dan mencari penyelesaian dengan baik. "Kehadiran negara diperlukan untuk membela rakyat untuk mencapai kesejahteraan," tutur pria kelahiran Cirebon dari Dapil Jawa Barat VII ini.

Inti RDP kali ini, jelas Dadang, untuk menghasilkan suatu eksekusi penyelesaian yang cepat dan baik secara bersama dan tidak saling merugikan. Ia mencontohkan, ada dua kasus persoalan tanah yaitu Kemayoran dan Senayan, akhirnya sepakat menyelesaikan bersama-sama dan tidak merugikan kedua belah pihak," pungkas dia.

nti.mp. foto: frcr/nti/hr



BUKU I RUU KUHP RAMPUNG JULI 2016



Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K. Harman

Buku I yang memuat enam bab dalam RUU KUHP diproyeksikan rampung pada Juli 2016. Panja RUU KUHP yang dibentuk Komisi III masih merampungkan beberapa masalah krusial dalam buku I ini.

Ketua Panja RUU KUHP Benny K Harman menyampaikan hal tersebut di Pontianak, Kamis (10/3), usai rapat dengar pendapat bersama Kapolda Kalimantan Barat. Hadir pula dalam pertemuan rapat itu Kajati dan Ketua Pengadilan Tinggi Kalbar.

"Saat ini sedang merampungkan buku satu. Diperkirakan bulan Juli buku satu akan selesai. Setelah itu masuk pembahasan buku dua," jelas politisi Partai Demokrat itu kepada pers.

Masalah krusial dalam buku I, lanjut Benny, adalah asas legalitas dan pidana hukum adat. Dalam asas legalitas, dibicarakan ketentuan perbuatan apa saja yang bisa dipidana dan tidak. Sementara pidana adat, memang masih jadi perdebatan yang cukup panjang, karena menyangkut norma dan hukum yang berlaku di komunitas adat tertentu di Indonesia.

Ditambahkan Benny, masalah yang tidak kalah krusialnya adalah tentang hukuman mati. Menurut Kajati Kalbar, hukuman mati tetap masih diperlukan untuk tindak pidana berat seperti narkoba. Panja RUU KUHP, kata Benny, mendapat masukan berharga dari para praktisi hukum di Kalbar.

mh. foto: Huseini/hr

KOMISI IV PRIHATIN NASIB TENAGA HARIAN LEPAS

Komisi IV DPR mengadakan RDPU dengan Forum Komunikasi Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluhan Pertanian Nasional (THL-TBPP) di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/03).

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron didampingi Siti Hediati Soeharto itu, agendanya mendengarkan berbagai masukan dan keluhan dari peserta rapat, terkait rencana pengangkatan THL-TBPP menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Kementerian Pertanian pada bulan April 2016.

Namun informasi yang beredar belakangan ini melalui pemberitaan di media massa, bahwa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) aturan turunan dari Undang-Undang ASN "ditolak oleh Presiden RI." Hal tersebut tentunya menimbulkan kekhawatiran THL-TBPP mengenai rencana pengangkatan tersebut yang kemungkinan tidak bisa direalisasikan.

Salah seorang peserta rapat juga mempertanyakan kenapa kontrak kerja mereka hanya berlaku untuk 10 bulan saja setiap tahunnya, tetapi mereka juga dituntut untuk meningkatkan hasil kerjanya

namun gaji mereka tidak pernah mengalami peningkatan.

"Kami di Komisi IV merasa prihatin atas segala persoalan yang dihadapi oleh teman-teman dari Forum Komunikasi THL-TBPP,



Komisi IV DPR saat audiensi dg tenaga harian lepas penyuluh pertanian

tertapi saya minta kepada rekan-rekan semua untuk tetap bekerja dengan baik, dan hal-hal yang berkaitan dengan keputusan politik dan regulasi biar menjadi urusan para anggota Dewan di Parlemen," ucap Herman, politisi Partai Demokrat menegaskan.

Selain itu peserta audiensi juga mengungkapkan bahwa sudah empat rekan mereka yang meninggal dunia dalam menjalankan tugasnya dalam kurun waktu

satu bulan ini, padahal mereka belum menerima honor sejak bulan Januari sampai sekarang.

Mereka merasa tidak ada upaya advokasi dan seolah-olah hanya dianggap sebagai pekerja yang tidak berarti. Harapannya agar urusan honor rekan mereka yang wafat bisa mendapat perlakuan khusus, paling tidak honorinya selama tiga bulan belakangan dapat diberikan sesuai haknya.

"Komisi IV ikut berbelasungkawa terhadap teman-teman THL-TBPP yang meninggal pada saat menjalankan tugas, dan kami mendo'akan semoga mendapat tempat yang layak di sisi Tuhan Yang Maha Esa," ujar Titiek Soeharto.

"Kita juga sangat bersimpati dengan masalah yang dihadapi oleh rekan-rekan THL-TBPP, dan akan menyampaikan masalah ini pada saat rapat dengan Kementerian terkait," lanjutnya.

Ujung tombak keberhasilan swasembada adalah ada pada penyuluh, jika pemerintah Jokowi ingin mengulang kesuksesan swasembada seperti masa lalu, maka kepentingan para penyuluh harus diperhatikan kesejahteraannya," pungkas politisi F-PG Dapil DIY tersebut.

dep.mp. foto: oji/hr



SEKOLAH FILM DIPERLUKAN JIKA ADA STANDAR PEKERJA FILM YANG JELAS

Wacana pembentukan sekolah perfilman yang akhir-akhir ini mengemuka dalam setiap rapat Panja Perfilman Komisi X DPR RI, mendapat sorotan dari Anggota Komisi X DPR RI Lucky Hakim. Ia menilai, sekolah perfilman akan menjadi mubadzir, jika standar mengenai pekerja film belum ditentukan.

"Saya rasa, sekolah perfilman ini penting, kalau ada standarnya. Jika tak ada standarisasi, maka akan mubadzir. Biar sehebat apapun sekolah perfilman, realitanya banyak orang yang tidak sekolah, tapi bisa menjadi pelaku film, karena memiliki skill," nilai Lucky, usai RDP dengan Ketua Persatuan Karyawan Film dan Televisi, di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Senin (14/03/2016) malam.

Yang dimaksud Lucky dengan standardisasi itu yakni acuan yang diberikan kepada para calon pekerja film, ketika akan melamar pada proyek film. Sehingga, nantinya, setiap pekerja film akan menjalani ujian terlebih dahulu, yang itu hanya ada di sekolah perfilman, dan akan mendapatkan semacam sertifikasi untuk melamar pekerjaan di proyek film.



Anggota Komisi X DPR RI Lucky Hakim

"Sekolah ini diadakan untuk melatih agar tercipta pekerja film yang terlatih. Tapi ketika mereka mencari pekerjaan tapi ternyata yang diserap adalah orang-orang yang tidak perlu lulusan sekolah perfilman, karena tidak ada regulasinya, lalu, ngapain sekolah," kata Lucky, seolah bertanya.

Untuk itu, politisi F-PAN ini menyarankan, agar dibuat dulu standardisasi dalam perfilman, terkait pekerjaannya. Sehingga, setiap orang akan menjalani sekolah perfilman, untuk mendapatkan sertifikat melamar pekerjaan di proyek film. Apalagi, dengan dibukanya 100 persen DNI untuk perfilman, tentunya dibutuhkan pekerja film yang mampu

bersaing dengan asing.

"Selama ini, kita tidak ada standar di insan perfilman kita. Masih awang-awang, karena kita tidak punya instrumen untuk mengukur. Bisa jadi, yang kita tonton di TV saat ini, adalah produk dari hasil-hasil orang yang tidak memiliki standar tertentu dalam perfilman," khawatir Lucky.

Politisi asal dapil Jawa Barat itu yakin, jika nanti ada standar yang jelas, maka niatan pekerja film untuk bersekolah juga akan ada.

Sementara itu Anggota Komisi X DPR RI Venna Melinda (F-PD) berharap, sekolah perfilman akan dibuat di seluruh wilayah Indonesia, baik di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan, ataupun tingkat Perguruan Tinggi.

"Kita membayangkan, nanti di setiap provinsi, akan ada Fakultas Perfilman. Nanti dalam revisi UU No 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, akan dimasukkan ke dalam pasal tentang pendidikan perfilman. Kita akan mulai dari tingkat SMK, karena paling siap kerja. Kemudian dilanjutkan di tingkat Perguruan Tinggi," harap politisi asal dapil Jawa Timur itu.

sf. foto:cafe/hr.

KOMISI VIII TINJAU KESIAPAN BPBD SULUT

Komisi VIII DPR RI meninjau kesiapan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Utara untuk mengantisipasi bencana alam di daerah tersebut.

Dalam kunjungan kerja Komisi VIII, rombongan juga meninjau kerusakan dan rehabilitasi pembangunan di beberapa daerah di Kota Manado, Sulawesi Utara yang terkena banjir besar yang terjadi tahun 2014 lalu.

"BPBD harus meningkatkan kewaspadaan dan melakukan upaya antisipasi dini bencana alam," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Deding Ishak di Sulut, Kamis (10/3).

Ia mengatakan banjir merupakan kasus berulang sehingga pemerintah daerah dan BPBD harus melakukan antisipasi. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sulut Noldy Liow menyiagakan seluruh personil untuk mengantisipasi bencana banjir, tanah longsor, gunung meletus dan bencana alam lainnya.

"Kita terus melakukan berbagai upaya antisipasi dini, misalnya sosialisasi, pelatihan siaga bencana masyarakat, membentuk desa siaga



Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI Kunjungi BPBD Provinsi Sulawesi Utara

bencana, pemasangan papan peringatan bencana di daerah titik-titik rawan bencana," ujarnya.

and. foto: Andri/hr.



KENAIKAN IURAN BPJS KESEHATAN HARUS DIIMBANGI PENINGKATAN PELAYANAN



Sumber: bpjs.kemkes.go.id

Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf

Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf mengatakan, Kamis (17/03/2016), Panitia Kerja (Panja) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, akan melaporkan kepada Komisi IX DPR mengenai rekomendasi yang akan disampaikan kepada Pemerintah, terkait iuran peserta mandiri yang akan naik mulai per 1 April 2016.

"Mudah-mudahan dalam rekomendasi tersebut ada permintaan untuk menunda kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan mandiri," katanya, usai Rapat Paripurna di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Selasa (15/03/2016).

Politisi F-PD itu menilai, hasil temuan Panja BPJS Kesehatan selama ini di lapangan, serta laporan dari masyarakat, masih banyak terjadi penolakan dari rumah sakit bagi peserta pengguna BPJS Kesehatan.

"Apalagi selama ini Panja BPJS Kesehatan belum pernah menyetujui adanya kenaikan premi, kita masih terus meminta pelayanan untuk ditingkatkan," tegas politisi asal dapil Jawa Barat itu.

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI Siti Masrifah (F-PKB) mengatakan, pihaknya masih mendalami lebih lanjut mengenai rencana kenaikan premi. Mengingat masih banyak hal yang perlu dibenahi oleh BPJS Kesehatan.

"Boleh saja iuran dinaikan, asal diseimbangkan dengan pelayanan yang akan diterima oleh peserta BPJS Kesehatan baik peserta Mandiri dan Penerima Bantuan iuran (PBI). Kalau iuran mandiri harus sampai naik, saya harap kelas III harus digratiskan semua," kata politisi asal dapil Banten itu.

Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi IX DPR RI Hang Ali Saputra Syah Pahan. Politisi F-PAN ini menegaskan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan merupakan hal yang wajar, asal dibarengi dengan fasilitas baik sarana maupun prasarana yang akan di dapatkan peserta BPJS Kesehatan.

"Makanya anggaran pemerintah untuk kesehatan yang sebesar 5 persen dari APBN diharapkan dapat mempercepat peningkatan sarana-prasarana, ditambah dengan dana kesehatan daerah yang kita kenal dulu dengan sebutan Jamkesda. Diharapkan dana itu bisa digunakan untuk meningkatkan rumah sakit yang ada di daerah," imbuh politisi dapil Kalteng itu.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan kepada peserta mandiri melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 tahun 2016 mengenai Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Besaran iuran kelas I yang semula Rp. 59.500 menjadi Rp 80 ribu. Iuran Kelas II yang semula Rp. 42.500 naik menjadi Rp 51 ribu. Sedangkan iuran kelas III yang semula Rp. 25.500 menjadi Rp. 30 ribu.

rmm,nt. foto: oji/hr

BALEG DPR AKAN RANCANG PERATURAN DPR TENTANG HAK PROTOKOLER

Badan Legislatif (Baleg) DPR berencana akan merancang peraturan DPR tentang hak protokoler anggota DPR RI lanjutan dari UU No. 9 tahun 2010 tentang Keprotokolan.

Demikian terungkap saat Baleg DPR melakukan rapat bersama para staf ahlinya, yang saat itu memaparkan draf sementara tentang Hak Protokoler di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (10/3).

Anggota Baleg Rufinus Hotmaulana Hutauruk dari F-Hanura berpendapat bahwa draf peraturan DPR tentang Hak

Protokoler yang dipaparkan oleh para staf ahli ini masih perlu dianalisa dengan baik.

"Kita harus bicara tentang struktur disini baru bisa bicara substansi sesuai dengan *culture* yang ada di Indonesia, ini perlu banyak penambahan supaya RUU ini benar adanya," jelasnya.

Senada dengan yang dikatakan Rufinus, Ammy Amalia Fatma Surya anggota Baleg F-PAN juga mengkritisi hal tersebut, karena menurutnya fokus keprotokolan ini masih belum jelas.

"Ini keprotokolan fokusnya mau kemana, mengatur protokol kita sebagai

anggota DPR pas menghadiri acara kenegaraan atau pas kita ada di bandara yang menyediakan protokol untuk kita?,"tanya Ammy legislator dari dapil Jawa Tengah VIII.

Sementara itu dalam paparannya, staf ahli Baleg menerangkan bahwa dengan adanya peraturan tentang Hak Protokoler ini diharapkan dapat menciptakan hubungan baik antara lembaga negara dan antarbangsa.

Undang-undang ini diatur berdasarkan Asas Kebangsaan, Ketertiban, Kepastian Hukum, keseimbangan, keserasian,



PEMROV JAMBI MINTA DUKUNGAN KOMISI VIII DPR

Gubernur Provinsi Jambi Zumi Zola Zulkifli minta dukungan dan bantuan Komisi VIII DPR untuk menanggulangi bencana banjir dan tanah longsor di Provinsi Jambi.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Jambi saat pertemuan dengan Tim Kunjungan Spesifik Komisi VIII dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII Abdul Malik Haramain, Kepala BPBD Jambi, dan Kepala BPBD Kabupaten/Kota seprovinsi Jambi, di Kantor Gubernur Jambi, Kamis (10/3/2016)

"Banjir dan longsor di Jambi sejak Desember 2015 terjadi di 11 kabupaten/kota yang berada di daerah aliram sungai Batanghari, 39 kecamatan, dan 39 desa." kata Zumi Zola.

Ia menginformasikan, dampak banjir dan longsor telah mengakibatkan 4 orang meninggal, dan terendahnya 5.876 rumah, 19 sekolah, 4 unit sarana ibadah,

4 unit sarana kesehatan, 12 fasilitas umum, 7 unit jembatan putus serta 15 titik jalan mengalami longsor dan terendam.

"Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon dukungan dan bantuan Komisi VIII DPR, kami mengusulkan permohonan



Tim Kunjungan Spesifik Komisi VIII DPR saat pertemuan dengan Gubernur Jambi

bantuan berupa perbaikan jembatan gantung, pembuatan turak/terojong,

keselarasan dan timbal balik. Selain itu ruang lingkup ini juga meliputi Hak Protokol Anggota DPR RI, Hak Protokol Diplomatik, Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan.

Tujuan diadakannya pengaturan Protokol adalah untuk memberikan penghormatan kepada Pimpinan dan seluruh Anggota DPR RI, Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah serta Tokoh Masyarakat Tertentu.

Kemudian juga untuk memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara agar berjalan tertib, rapi, lancar, dan teratur sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, baik secara nasional dan internasional.

pembangunan hunian sementara bagi korban banjir dan relokasi warga terutama di Kabupaten Bungo yang mengalami dampak paling parah, perahu karet serta tangki air," papar Zumi Zola.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Tim Komisi VIII Abdul Malik Haramain menyatakan bahwa salah satu mitra kerja Komisi VIII adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). BNPB mempunyai DSP (Dana Siap Pakai) atau dana cadangan atau biasa kita sebut dana on call.

"Dana tersebut sebetulnya bisa keluar kalau ada bencana. Salah satunya sempat kita keluarkan untuk Jambi saat bencana asap tahun 2015 lalu", terang Malik.

Sebagaimana kita ketahui, lanjut politisi dari PKB ini, BNPB diberi tugas oleh negara melalui UUD 1945 yang punya kewajiban dan paling bertanggung jawab untuk mengatasi bencana ini adalah BMPB.

"Namun BNPB bukanlah Tuhan atau dewa. Tidak mungkin BNPB sendirian mengatasi bencana. Disamping karena dananya terbatas, SDM juga terbatas. Yang penting jangkauan terhadap terjadinya bencana semakin lebar," jelasnya.

Oleh karena itu, tambah Malik, kehadiran Komisi VIII di Jambi adalah untuk mendengarkan apa yang telah dilakukan terutama oleh BPBD di Jambi.

"Seperti apa koordinasi antara BPBD dengan Pemrov Jambi dalam hal ini Gubernur, seperti apa koordinasi BPBD dengan instansi-instansi terkait serta kami ingin mendengarkan kira-kira kebutuhan apa-apa saja dari Provinsi Jambi", imbuhnya.

"Insya Allah apa yang diinginkan dan yang diharapkan oleh Gubernur dan BPBD Jambi akan kita bawa dan akan kami sampaikan ke pemerintah pusat di Jakarta," tambah Malik.



Anggota Baleg Rufinus Hotmaulana Hutauruk

jaynt. foto: jay/hr

sc. foto: Suci/hr



KOMISI III PERTANYAKAN SULITNYA EKSEKUSI PUTUSAN MA



Anggota Komisi III DPR Adies Kadir

Komisi III DPR RI mempertanyakan sulitnya eksekusi terhadap putusan Mahkamah Agung, yang jelas-jelas merupakan putusan tertinggi di sistem pengadilan. Hal tersebut terungkap saat

rapat konsultasi Komisi III DPR RI dengan Mahkamah Agung, di Gedung MA, Jakarta, Senin (14/3).

"Kenapa eksekusi terhadap putusan kasasi perdata di MA ini susah sekali, dengan alasan harus menunggu PK. Padahal MA sendiri merupakan putusan tertinggi. Apa kendala yang dihadapi MA," ujar Adies Kadir, Anggota Komisi III DPR RI.

Hal senada juga disampaikan anggota Komisi III lainnya, Habib Abubakar Alhabsy misalnya, mempertanyakan putusan Kasasi MA terhadap berbagai kasus yang belum kunjung dieksekusi. Termasuk eksekusi terhadap Kasasi Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) terhadap

putusan pengadilan tinggi tata usaha negeri (PT TUN) lainnya atas kasus gugatan PSSI soal SK (surat keputusan) Pembekuan induk organisasi sepakbola Indonesia itu.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi III, Benny K Harman yang memimpin tim rombongan, kembali menegaskan kepada Ketua dan Para Wakil Ketua MA atas eksekusi putusan hakim agung yang sudah bersifat tetap tersebut.

"Kami sungguh-sungguh memohon perhatian MA bagi putusan Hakim Agung yang sudah bersifat tetap tapi tidak juga dieksekusi. Jangan sampai 'putusan MA bergigi ompong'," tegas Benny.

Menanggapi hal itu, Ketua MA, M Hatta Ali mengatakan bahwa eksekusi terhadap putusan MA itu menjadi kewenangan dari Ketua Pengadilan. Meski demikian Hatta mengatakan pihaknya akan memberikan masukan kepada Ketua Pengadilan untuk mengeksekusi berbagai putusan MA.

ayu. foto:andri/iv.

MUNCULNYA CALON INDEPENDEN BUKAN DEPARPOLISASI

Munculnya fenomena calon independen pada Pilkada DKI Jakarta tidak perlu disikapi secara berlebihan, apalagi sampai mengarah kepada pelemahan partai politik. Munculnya calon perseorangan bukan sebagai bentuk Deparpolisasi, justru fenomena ini harus disikapi secara baik.

"Fenomena ini mestinya disikapi secara baik oleh internal partai politik sebagai evaluasi diri. Kalau internal partai politik membaik, otomatis DPR dengan sendirinya juga akan lebih baik," kata Ketua Komisi II Rambe Kamarul Zaman saat diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk "Ancaman Baru Deparpolisasi" di Gedung DPR, Kamis (10/3).

Ditambahkannya, calon perseorangan atau independen dalam sebuah pilkada sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada. Sedangkan Internal partai politik memiliki

mekanisme sendiri memajukan calonnya dalam pilkada.

Politisi F-Golkar ini menegaskan, dirinya bukan orang yang anti dengan calon independen. Kenyataan yang sekarang ini ada ialah Parpol seperti tengah diganggu oleh isu deparpolisasi. Ia berharap, partai politik jangan lagi diganggu dengan isu deparpolisasi seperti ini menjelang Pilkada serentak.

"Saya berharap partai politik jangan direcoki. Dorong dia supaya berkembang, serta hentikan membangun opini Parpol tidak benar. Karena itu bertentangan dengan Undang-Undang kita," tegasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Pakar politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro yang

menegaskan, munculnya calon perseorangan tidak pantas disebut gerakan Deparpolisasi. Menurutnya, hal ini adalah amanat dari UU, dengan adanya fenomena pencalonan lewat jalur independen telah



Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman

memberikan tamparan pada partai politik untuk berbenah dan mereformasi agar mendapat kepercayaan masyarakat.

"Sikap Ahok yang memutuskan maju ke Pilkada DKI 2017 lewat jalur perseorangan, bukan deparpolisasi, tapi amanat UU dan pembelajaran politik," tegas Peneliti Bidang Perkembangan Politik Lokal itu.

ik.mp. foto:ojl/hr



NASRIL BAHAR : KABUPATEN KURANG EFEKTIF AWASI PENDISTRIBUSIAN PUPUK

Anggota Komisi VI DPR Nasril Bahar mengatakan terjadinya permasalahan kelangkaan pupuk dikarenakan ada mafia yang menyelewengkan pendistribusian pupuk dan kurang efektifnya pengawasan di tingkat kabupaten.

"Lini empat pengawasannya ada di Kabupaten. Nah Kabupaten lah yang bertanggungjawab, kabupaten ini ya kepala daerah, pengawasan di lini empat ini yang belum efektif, dan justru tidak terjadi," ungkap Nasril saat rapat Komisi VI melakukan RDP dengan Deputi Bid. Usaha Industri Agro dan Farmasi Wahyu Kuncoro, Dirut PT. Pupuk Indonesia Aas Asikin di Gedung DPR, Jakarta, Senin (14/3).

Nasril yang juga anggota DPR dari dapil Sumatera Utara III ini juga menerangkan, meskipun di dalam industri pupuk kemungkinan bisa terjadi penyelewengan, namun dia belum menemukan ada indikasi yang mengarah ke sana.

"Menurut saya, kemungkinan besar

penyelewengan ada di lini empat, yakni di tingkat kepala daerah, dan dari dalam industri pupuk itu ada tapi kami tidak menemukan, karena tugas mereka hanya pada ke lini tiga," jelas Nasril.

Ditambahkannya, oknum aparat kepolisian yang seharusnya melakukan tindakan pada penyelewengan ini absen dalam tugasnya. "Saya lihat oknum aparat bekerja tergantung pesanan," dakwa Nasril.

Politisi dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini memperinci penjelasannya, bahwa permainan mafia yang mengakibatkan kelangkaan pupuk itu ada pada tingkat distributor dan pengecer, sehingga petani banyak yang tidak kebagian pupuk dikarenakan kekurangan pasokan.

"Permainannya ada di tingkat pengecer, terkadang juga ada pada tingkat distributor yang tidak komit untuk menyalurkan kepada petani, malahan ada pengecer dan distributor yang justru menjual pupuk kepada mafia bukan pada

petani," tegasnya.

Selain mafia, lanjut Nasril, juga ada persolan kurangnya koordinasi pada pemangku kepentingan yang bertanggungjawab. Padahal menurut laporan PT. Pupuk Indonesia, pupuk yang diproduksi sudah diprediksi cukup memenuhi kebutuhan petani.

"Kurang koordinasinya antara pemangku kepentingan, dari proses lini satu hingga lini empat, ini adalah satu hal yang belum didapatkan solusinya," pungkasnya.



Anggota Komisi VI DPR Nasril Bahar



JULIARI P BATUBARA JADI WAKIL KETUA BKSAP

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon melantik Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) yang baru Juliari P Batubara (F-PDI Perjuangan). Juliari menggantikan Wakil Ketua yang lama dari Fraksi PAN Teguh Juwarno.

Juliari ditetapkan dalam Rapat Pleno BKSAP, Selasa (15/3), dan dihadiri Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf, Wakil Ketua Tantowi Yahya, dan para anggota BKSAP lainnya. BKSAP, kata Fadli, sudah tiga kali melakukan pergantian pimpinan. Kini, formasi



Wakil Ketua DPR Fadli Zon dengan Pimpinan BKSAP

pimpinan BKSAP sudah lengkap. Formasi pimpinan baru BKSAP selengkapya adalah Nurhayati Ali

Assegaf sebagai ketua dan didampingi empat wakil ketua masing-masing Tantowi Yahya (F-PG), Juliari P Batubara (F-PDI Perjuangan), Rofi' Munawar (F-PKS), serta Syaifullah Tamliha (F-PPP).

"Ini hasil dari kesepakatan bersama. Saya kira selama tidak ada komplain dari semua fraksi, saya kira tidak ada masalah. Ini bagian dari dinamika politik yang baru terealisasi sekarang. Kita berharap kepada Pimpinan BKSAP yang baru bisa bekerja lebih optimal. Dan mampu menjalankan tugas yang diamanatkan UU MD3, khususnya dalam diplomasi parlemen. Ini yang diemban oleh BKSAP," kata Fadli usai rapat.

eko.nt. foto : jakey/hr.

mh. fotocoreno/w.



KUNKER KOMISI X SEBAGAI ACUAN PEMBAHASAN RAPBN 2017

Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR-RI Ferdiansyah menjelaskan, Kunker ke Provinsi Kalimantan Timur kali ini sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan pada bidang pendidikan tinggi. Selain itu juga sebagai acuan guna tolak ukur perumusan anggaran untuk perguruan tinggi di tahun anggaran 2017.

"Fungsi pengawasan ini juga akan berdampak ketika kita akan membahas RAPBN 2017. Supaya bisa menutupi kekurangan yang ada, kalau tidak bisa menutupi seluruhnya, paling tidak setelah kunker ini ada satu atau dua masalah yang bisa terselesaikan," jelas Ferdiansyah di Balikpapan, Kamis (10/3).

Keterbatasan anggaran yang dimiliki negara, kata Ferdiansyah, membuat para anggota dewan selaku perumus anggaran bersama pemerintah harus putar otak, agar setiap sektor kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi secara proporsional. Hal ini yang menjadikan anggota dewan memprioritaskan penuntasan masalah yang paling mendesak untuk diatasi.

"Supaya kedepan APBN ini juga memberikan manfaat yang lebih efektif dan efisien. Dan fungsi APBN ini sebagai pemicu pembangunan agar lebih berhasil," ungkap Wakil Ketua Komisi X DPR.

Ferdiansyah juga mengungkapkan prioritas masalah Perguruan Tinggi Negeri di Kaltim ini pada sektor Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) adalah soal afirmasi anggaran untuk penetapan yang positif pada wilayah ini. Sedangkan untuk sektor beasiswa untuk mahasiswa dan peningkatan kualitas dosen adalah unit cost nya.

"Untuk masalah BOPTN adalah afirmasi terhadap daerah Kalimantan Timur, untuk yang beasiswa yaitu unit cost nya, artinya unit cost untuk bidik misi tentu berbeda dengan wilayah Indonesia



Tim Kunspek Komisi X DPR berdialog dengan Sekda Kalimantan Timur

yang ada di bagian barat. Kita akan menyampaikan kepada Kemenristek Dikti, perlu dikaji untuk pembedaan pemberian bidik misi unit cost nya," jelas Dewan dari dapil Jawa Barat XI.

Menurut Politisi dari Fraksi Partai Golongan Karya ini, yang menjadi dasar dari alokasi BOPTN adalah jumlah siswa serta jumlah dosen yang ada di kampus tersebut. Sedangkan yang diharapkan para pimpinan PTN yang ada di Kaltim adalah pendekatan yang dijadikan dasar pemberian bantuan operasional kampus tidak statis. Menurut mereka harus ada perubahan terhadap perumusan alokasi dasar jadi mahasiswa, dosen, luas dari area wilayah universitas juga harus ditinjau secara proporsional.

"Pendekatannya adalah afirmatifnya. Afirmasinya perlu ada pengecualian untuk daerah-daerah tertentu," ungkap Ferdiansyah.

Dia juga menjelaskan mahasiswa

berprestasi yang ada di daerah seharusnya menjadi urusan pemerintah, sebenarnya di daerah luar Jawa banyak mahasiswa berprestasi, namun yang menjadi keluhan mereka adalah soal kesempatan. Sebagaimana diungkapkan saat rapat bersama Pimpinan PTN yang ada di Kaltim, mahasiswa di daerah membutuhkan kesempatan yang sama dengan yang ada di daerah dekat pusat pemerintahan.

"Perlu juga diberikan kuota untuk menindaklanjuti mahasiswa-mahasiswa berprestasi. Itu perlu diberi pengkuotaan, kalau tidak, di Indonesia bagian lain akan tertinggal jauh. Dengan kata lain bagi kami adalah, tentu tidak akan sama persis, masalah utama jumlah penduduk yang harus kita cermati namun yang terpenting adalah penambahan dari jumlah yang ada hari ini,"ujarnya.



KOMISI XI SELESAIKAN DRAF AKHIR RUU PPKSK

Komisi XI DPR RI lewat Panja RUU JPSK sudah menyelesaikan draf akhir RUU Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK). Setelah melawati pembahasan maraton, rumusan RUU ini terdiri dari 9 bab dan 59 pasal.

Dalam rapat Panja, Jumat (11/3), yang dipimpin Ketua Komisi XI Ahmadi Noor Supit (F-PG), draf RUU ini segera akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR. RUU PPKSK tersebut kelak akan menggantikan UU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). Rumusan pasal-pasal RUU PPKSK lebih jelas dan terarah daripada UU JPSK yang kini masih berlaku.

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) tetap diatur dalam Bab II RUU ini. Dalam Pasal 4, KSSK yang beranggotakan Menkeu, gubernur BI, ketua OJK, dan ketua LPS, menyelenggarakan pencegahan dan penanganan krisis keuangan untuk ketahanan negara di bidang

perekonomian. Pasal 5 dan 6 dirumuskan tugas dan wewenang KSSK. Ia bertugas menetapkan penanganan krisis keuangan dan menetapkan pula penanganan permasalahan bank sistemik dalam kondisi normal maupun krisis.

Sementara kewenangan KSSK diatur dalam pasal 6. Pada butir f pasal ini disebutkan, KSSK berwenang memberi rekomendasi kepada presiden untuk memutuskan status stabilitas sistem keuangan dari normal ke kondisi krisis atau sebaliknya. KSSK juga berwenang merekomendasikan kepada presiden untuk memutuskan penyelenggaraan dan pengakhiran program restrukturisasi perbankan.

Bila kelak RUU ini disahkan, maka menjadi produk UU pertama yang dihasilkan Komisi XI DPR pada periode ini. RUU ini memang sangat strategis dan urgen untuk menggantikan UU lama yang

rumusannya dinilai sudah tak representatif lagi. Anggota Komisi XI Indah Kurnia mengatakan, PPKSK diharapkan tampil lebih prima dengan RUU yang akan disahkan ini.

"Kalau sudah selesai, maka ini adalah output atau produk pertama UU yang kita lahirkan bersama dengan pemerintah. RUU PPKSK ini, menurut p e n g a m a t a n saya, menjadi bukti bahwa PPKSK benar-benar tampil prima dan mereka mampu berkoordinasi dengan seluruh anggotanya," katanya usai rapat.



Ketua Komisi XI DPR Ahmadi Noor Supit

KOMISI II DUKUNG MENSESNEG REFORMASI MENYELURUH PENATAAN PPK GBK DAN KEMAYORAN

Komisi II DPR RI dan Kementerian Sekretariat Negara sepakat untuk membahas secara lebih mendalam berbagai permasalahan dan desain besar serta road map penataan terkait pengelolaan aset negara yang berada di bawah pengelolaan Kementerian Sekretariat Negara dan Panja Aset Negara dan Tata Ruang yang telah di bentuk oleh Komisi II.

Demikian salah satu kesimpulan Raker Komisi II DPR dengan Mensesneg Pratikno bersama Dirut Utama Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran Dwi Nugroho dan Direktur Utama Pusat Pengelolaan Gelora Bung Karno Winarto, Kamis (10/3) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Dalam acara yang dipimpin Wakil Ketua Komisi Wahidin Halim, Komisi II juga mendukung komitmen Kementerian Sekretariat Negara untuk mengaudit dan mereformasi secara menyeluruh penataan BLU PPK GBK dan BLU PPK



Komisi II DPR Raker dengan Mensesneg

Kemayoran, sekaligus menuntaskan beragam kasus-kasus yang terjadi di masa lalu.

Wakil Ketua Komisi II Wahidin Halim menambahkan, pembentukan Panja dimaksudkan akan mempertajam apakah ada masalah dalam pengelolaan aset negara atau terjadi kerugian negara.

Dalam kesempatan tersebut Mensesneg Pratikno menyampaikan rincian-rincian aset negara per 31 Desember 2015 berupa tanah

dan bangunan serta sejumlah kendaraan. Seiring dengan perubahan organisasi Kementerian Sekretariat Negara pengelolaan kedua BLU sekarang ini juga berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015.

Dalam pengelolaan lahan BLU PPKGBK, hingga posisi tahun

2015 dari keseluruhan lahan seluas 279,08 hektar yang telah dikerjasamakan secara komersial adalah sebesar 66,05 hektar atau 23,67 persen. Dan sebagian besar lahan dimanfaatkan kawasan olah raga yaitu seluas 147,53 hektar atau 52,83 persen dan kawasan pemerintah seluas 65,60 hektar atau sebesar 23,50 persen. Adapun nilai aset BLU PPKGBK hingga 31 Desember 2015 adalah Rp 49,41 Triliun, sedangkan nilai aset BLU PPKK per 31 Desember 2015 adalah Rp 25.06 Triliun.



REVISI UU KUHP AKOMODIR HUKUM ADAT

Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menegaskan Revisi UU KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang sedang dibahas Panja Komisi III DPR akan mengakomodir *living law*, atau hukum adat yang masih hidup dan berjalan di tengah masyarakat dimana hukum adat tersebut masih hidup di 34 provinsi seluruh Indonesia.

Jangan seperti UU Pornografi dan Pornoaksi terdahulu, yang ditolak oleh masyarakat Bali, Papua dan daerah lain, terlepas dari motivasinya itu untuk apa? Juga hukuman mati, yang tidak bisa mengabaikan tuntutan global dunia, yang sebagian besar sudah menghapus hukuman mati tersebut. Karena itu dalam

Panja baru membahas asas-asas hukum pidana dalam buku I, yang akan selesai sekitar Juli atau Agustus 2016 mendatang. Sedangkan dalam buku II -nya sudah berbicara delik pidana. "Kita baru membahas asas-asas pidana," ujarnya.

Sementara, Enny Nurbaningsih mengakui jika pemerintah dan DPR RI baru membahas asas-asas hukum pidana. Di mana asas-asas tersebut mengakomodasi rencana strategis (Renstra) nilai-nilai kebangsaan Indonesia, mengakomodir *living law*, dan lain-lain. Di mana tim Kemenkumham RI sebagai penggagas cukup solid, sehingga dalam setiap pembahasan selalu

melibatkan pihak-pihak terkait. Seperti Kepolisian, Kejaksaan, MA, KPK, BNN, BNPT dan lain-lain.

"Jadi, Kemenkumham sudah melibatkan seluruh penegak hukum yang ada. Jika memang terkait terorisme, maka melibatkan BNPT, narkoba melibatkan BNN, korupsi tentu dengan KPK, dan seterusnya. Termasuk hukum adat yang masih hidup di tengah masyarakat. Mengapa? Agar sebuah produk hukum yang sudah diputuskan bisa langsung

dijalankan, dan tidak digugat (*judicial review*) ke MK," kata Enny.

Ada faktor-faktor yang meringankan, memberatkan, juga melakukan kejahatan pidana berkali-kali tapi ketahuan sekali, maka penjatuhan putusan hukumnya tidak lebih dari 20 tahun. "Tak boleh mengakumulasi hukuman dari kejahatan yang satu dengan kejahatan yang lain, sehingga hukumannya sampai 20 tahun ditambah 10 tahun sehingga menjadi 30 tahun dan seterusnya. Itu tidak boleh," tutur Enny lagi.

Dengan demikian kata Enny, proses pembahasan RUU KUHP ini dilakukan tidak dengan tergesa-gesa dan melibatkan seluruh komponen masyarakat sampai benar-benar mencapai keyakinan bersama. Termasuk di dalamnya terkait kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime, lex specialist, lex generalist*) dan sebagainya.

Sedangkan, Akhyar Salmi menyatakan agak bingung dengan draft UU KUHP tersebut, karena yang buku satu pakai asas, tapi yang lain tidak. Sehingga ada ketidakkonsistenan. Seperti asas wilayah, asas nasional pasif, asas nasional aktif, dan asas internasional. "Itulah yang harus diclearkan, agar tujuan pemidanaan itu tidak dijadikan norma saja, melainkan harus dijalankan," ungkapnya.

Mengapa? Sebab, kalau tujuan itu dipahami sebagai norma, maka tak akan ada kekonsistenan seperti dengan hukuman mati itu sendiri di masyarakat. Karena itu, pasal 55 dalam buku I, itu bertentangan dengan pidana pokok hukuman mati. "Karena doktrin itu akan selalu berkembang dan tidak perlu diatur, dan tujuan pidana itu kita serahkan kepada penegak hukum," tambah Akhyar.

Selain itu kata Akhyar, tidak perlu menghimpun semua delik yang ada. Sebab, dalam hukum pidana manapun delik administrasi itu berbeda dengan delik pidana umum, dan memang tidak boleh 2 tindak pidana dijatuhi hukuman sekaligus. Misalnya tindak pidana korupsi dengan mengganti uang kerugian negara. "Apa uang itu bisa mengganti korupsi? Kalau begitu, koruptor akan senang. Jadi, itulah antara lain yang harus diclearkan," pungkasnya.



Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil Dalam Diskusi Forum Legislasi

RUU KUHP ini dinamai sebagai pidana mati bersyarat," tegas Nasir Djamil dalam diskusi forum legislasi DPR RI tentang Revisi UU KUHP bersama Kepala BPHN Kemenkumham RI Enny Nurbaningsih, dan pakar hukum pidana UI Akhyar Salmi di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (15/3/2016).

Selain itu terkait hukum Islam yang diterapkan di beberapa daerah seperti Aceh Darussalam, semua itu kata politisi PKS ini, akan dipelajari oleh Panja Revisi UU KUHP Komisi III DPR RI. Hanya saja



MASIH ALAMI DISKRIMINASI, SETJEN DPR HARAPKAN RUU DISABILITAS SEGERA DISAHKAN

Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti memberikan sambutan pada pembukaan pameran lukisan, pentas seni, dan seminar nasional kaum Disabilitas, dalam rangka mendorong pemerintah untuk segera menindaklanjuti RUU disabilitas, Senin (14/03), di gedung DPR RI, Jakarta.

A cara diskusi nasional dan pameran lukisan oleh para pelukis penyandang disabilitas ini kami harapkan bisa menjadi bola salju yang akan menggelinding dengan dorongan yang semakin besar, sehingga perjalanan RUU ini menjadi Undang-undang yang sangat dinanti oleh para penyandang disabilitas bisa menjadi kenyataan dan lebih cepat terlaksana," ucap Win.

Pertimbangan Setjen DPR RI untuk ikut mendorong RUU Penyandang Disabilitas agar segera ditindaklanjuti

pemerintah, karena para penyandang disabilitas masih banyak yang mengalami diskriminasi baik secara fisik, mental, intelektual, bahkan sensorik saat berinteraksi di lingkungan sosial.

Setelah menjadi RUU Inisiatif DPR maka tahap selanjutnya adalah menanti langkah pemerintah untuk memberikan tanggapan berupa Daftar Inventaris Masalah (DIM), sekaligus menunjuk kementerian terkait yang akan

menjadi mitra pembahas.

Win juga mengatakan, saudara-saudara kita penyandang disabilitas ini juga merupakan anak-anak bangsa, oleh karena itu Sekretariat Jenderal DPR RI juga ikut ambil bagian dengan memfasilitasi kegiatan ini agar dapat terlaksana dengan baik. Setjen DPR juga memberikan dukungan kepada kaum disabilitas agar kekayaan bakat yang mereka miliki juga bisa disejajarkan dengan para seniman lain secara profesional.

dep.mp foto:jaka,jay/hr.



Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti membuka pameran lukisan disabilitas

NORWEGIA APRESIASI KOMITMEN INDONESIA

Pemerintah Norwegia mengapresiasi komitmen Indonesia dalam merealisasikan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB). Dan salah satu komitmen itu adalah pemberantasan *illegal fishing* dan *trafficking*. Norwegia siap membantu Indonesia untuk itu.

Demikian mengemuka dalam pertemuan Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) Nurhayati Ali Assegaf saat menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Stig Traavik, Selasa (15/3), di DPR. Ini bagian dari diplomasi parlemen, agar semua tujuan yang digariskan pemerintah dan DPR bisa mendapat dukungan dari dunia internasional.

"Norwegia ingin membantu Indonesia.



Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf saat menerima Duta Besar Norwegia

Dia punya *interest* dan komitmen terhadap Indonesia. Komitmen itu misalnya, dengan mendukung pemberantasan *illegal fishing*. Indonesia dan Norwegia ingin menginisiasi pemberantasan *illegal fishing*. Selama ini di forum-forum internasional parlemen, selalu ada resolusi-resolusi tentang *illegal fishing*, *trafficking*, *illegal migrant*, dan

lain-lain. Kita banyak melakukan kerja sama antarpemerintah, baik di regional maupun internasional," papar Nurhayati.

Norwegia sangat mengapresiasi pembentukan Panja TPB oleh BKSAP. Dengan Panja itu, DPR juga berharap, Norwegia bisa ikut berperan dalam pencapaian TPB. "Indonesia berkontribusi banyak sekali pada 17 TPB. Dan DPR RI ingin Indonesia memimpin isu TPB tersebut," tambah Nurhayati lebih lanjut.

Ketujuhbelas TPB yang sudah digariskan Panja, diantaranya adalah memberantas kemiskinan, memastikan pendidikan berkualitas, mencapai kesetaraan gender, memastikan ketersediaan air, membangun infrastruktur yang kokoh, dan memastikan pola konsumsi maupun produksi yang berkelanjutan.

mh. foto:jay/tw.



PANSUS DPR DORONG KPK USUT KASUS PELINDO II

Panitia Khusus (Pansus) Angket DPR tentang Pelindo II menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan informasi tambahan terkait permasalahan yang terjadi di PT. Pelindo. Salah satunya perpanjangan kontrak Jakarta International Container Terminal (JICT) dengan Hutchinson Port Holding (HPH) Hongkong yang dilakukan Direktur Utama Pelindo II RJ Lino tanpa izin konsesi terlebih dahulu.

"Kedatangan kami tidak untuk intervensi permasalahan yang sudah ditangani KPK tetapi untuk memberikan support. Kami sangat berharap bisa bersinergi sehingga nanti JICT bisa kembali menjadi milik Indonesia," papar Ketua Pansus Rieke Diah Pitaloka usai menemui Pimpinan KPK di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (10/03).

Hal senada disampaikan oleh anggota Pansus Dwie Aroem Hadiatie (F-Golkar), kedatangan pansus untuk meminta lembaga anti rasuah tersebut segera menindaklanjuti temuan pansus yang mengindikasikan kerugian negara dalam perpanjangan kontrak JICT.

Dalam kesempatan tersebut, Rieke juga meminta KPK jangan hanya fokus pada

kasus pengadaan barang saja, tetapi mengusut seluruh praktik korupsi yang telah terjadi di Pelindo II. Diantaranya perpanjangan kontrak JICT dan KSO Terminal Peti Kemas (TPK) Koja yang diperpanjang sebelum masa kontrak habis,

Proyek Pembangunan New Priok (Kalibaru) senilai 46 triliun serta penerbitan global bond senilai USD1,6 juta. "Jadi ini angka yang cukup besar dan mudah-mudahan kita bisa bekerja sama," imbuah politisi PDIP ini.

Selain itu, untuk mendukung penyelidikan KPK, Pansus tentang Pelindo II telah menyerahkan dokumen penting yang dikumpulkan selama melakukan Rapat Pembahasan baik RDP ataupun RDPU. Dengan harapan adanya indikasi kesalahan yang dilakukan oleh Pelindo II

dan pihak asing mampu membebaskan Indonesia dari termination value perpanjangan kontrak JICT.

Sementara itu, Pimpinan KPK Agus Rahardjo mengatakan pihaknya akan mempelajari semua masukan pansus. "Jadi kita lakukan penyelidikan terlebih dahulu



Pansus Angket Pelindo II DPR menyerahkan dokumen ke KPK

kalau memang ada alat bukti proper, nanti kita akan gabungkan dengan penyidikan yang sedang berjalan," ujar Agus.

Sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu KPK telah menetapkan RJ Lino sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan tiga Quay Container Crane (QCC) pada tahun 2010. Turut serta hadir dalam acara ini, anggota Pansus Hak Angket Pelindo II Irmadi Lubis (F-PDIP), Masinton Pasaribu (F-PDIP) dan I Putu Sudiartana (F-Demokrat).

ann.mp. foto:seno/iw.

HARGA MINYAK DUNIA TURUN, DPR PERTANYAKAN LANGKAH PERTAMINA



Komisi VI DPR mempertanyakan langkah apa yang dilakukan Pertamina untuk merespon penurunan harga minyak dunia.

"Apa langkah-langkah dan tindakan yang dilakukan Pertamina untuk merespon penurunan harga minyak dunia?" tanya Ketua Komisi VI DPR A. Hafisz Tohir saat RDP Komisi VI dengan Dirut Pertamina Dwi Soetjipto di Gedung

DPR, Jakarta, Senin (14/3).

Menurut Hafisz, dirinya juga mempertanyakan soal pengaruh penurunan harga minyak terhadap rencana investasi Pertamina.

Menanggapi hal tersebut, Dirut Pertamina Dwi Soetjipto menjelaskan, bahwa Pertamina tengah merencanakan perbaikan struktur keuangan, seperti penyelesaian piutang



KURS RUPIAH DEKATI NILAI INTRINSIK

Kurs rupiah yang pada Senin (14/3) ditutup Rp 13.057 per USD dipandang sudah mendekati nilai intrinsiknya. Rupiah kemungkinan masih akan terus menguat hingga ke level Rp12.000. Namun, faktor eksternal juga masih akan mewarnai fluktuasi nilai tukar rupiah ke depan.

Demikian disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Johnny G Plate (F-Nasdem) sesaat sebelum mengikuti Rapat Paripurna DPR, Selasa (15/3). "Kurs rupiah saat ini mendekati nilai intrinsiknya. Dia masih akan lebih menguat seperti yang kita harapkan sampai pada kisaran Rp12 ribuan. Itulah harga intrinsik rupiah. Kita harapkan begitu."

Dikatakan Johnny, perkembangan rupiah tentu sangat dipengaruhi oleh keputusan pemerintah saat ini di bidang moneter. Di sisi lain, The Fed yang akan bersidang tentu akan sedikit menguatkan USD. Penguatan USD kemungkinan akan berpengaruh terhadap beberapa mata uang anchor lainnya. "Tentu itu akan mempengaruhi rupiah pula untuk short term (jangka pendek)," urai politisi dari dapil NTT I ini.

Menurut Johnny, kebijakan BI yang menurunkan suku bunga dan kebijakan

pemerintah yang mendorong ruang investasi bersahabat, akan mempengaruhi kepercayaan terhadap rupiah. Apalagi, ada dana-dana likuiditas internasional yang masuk ke Indonesia, seperti dari China Development Bank yang masuk sebesar USD 3 miliar.

Sebagian dana itu digunakan untuk refinance atau kredit dalam bentuk rupiah yang dilakukan perbankan. Itu akan menambah likuiditas di dalam negeri. Dan likuiditas tersebut, sambung Johnny, selain akan mendorong investasi-investasi baru di dalam negeri juga akan menambah kepercayaan terhadap rupiah.

Sementara saat ditanya soal faktor penghambat penguatan rupiah dari devaluasi yuan yang akan terjadi, dia menjawab, Indonesia punya portopolio perdagangan yang sangat signifikan dengan Tiongkok. Transaksi yang dilakukan selain menggunakan USD juga dengan

renminbi (yuan). Memang benar ada pengaruhnya terhadap penguatan rupiah, tapi itu tidak berdampak terlalu besar sepanjang Indonesia bisa memanfaatkan relasi dagang dengan Tiongkok.



mh. Foto : Arief/hr

Anggota Komisi XI DPR RI Johnny G Plate



Ketua Komisi VI DPR Hafisz Tohir

ke negara, penyesuaian strategi jangka pendek dan jangka panjang, serta pengelolaan perencanaan dan evaluasi investasi.

"Kami akan menargetkan pengurangan biaya operasi 30 persen, serta menjaga tingkat kesehatan perusahaan dengan mempertahankan rasio Ebitda," kata Soetjipto.

Ia menambahkan, harga minyak mentah Brent diperkirakan masih akan berkisar di range USD 30-40 per barel di tahun 2016. "Supply OPEC kemungkinan belum akan mengurangi produksinya di tahun 2016, bahkan Saudi menyatakan belum bersedia

mengurangi produksi minyak, sedangkan Iran menyatakan akan tetap meningkatkan produksi hingga mencapai level, sebelum penerapan sanksi,"terangnya.

Lebih lanjut Soetjipto mengungkapkan, total supply dunia diperkirakan sedikit menurun 0.7 juta barel per hari., di sisi lain, pertumbuhan demand di Asia, khususnya India dan Cina diperkirakan meningkat terutama untuk produk Gasoline dan Avtur. "Total demand dunia diperkirakan tumbuh 1.2 juta barel per hari," jelasnya.

eko.nt Foto : Jaka/hr



MASYARAKAT MENARUH HARAPAN BESAR PADA RUU PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN

Seluruh Rakyat Indonesia menaruh harapan besar atas disahkan Undang-Undang tentang Perlindungan, Perberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Pembangunan kelautan dan perikanan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama para pelaku utamanya, yakni nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam.

Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Parbowo menjelaskan UU tentang Perlindungan, Perberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, bertujuan untuk menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha, memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan, menumbuhkembangkan system dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha, melindungi dari resiko bencana alam, perlindungan iklim, serta pencemaran dan memberikan jaminan dan keselamatan serta bantuan hukum.

"Diperlukan hadirnya negara dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi pelaku utama pemanfaat potensi sumber daya perikanan dan kelautan," kata Edhy Parbowo, dalam Sidang Paripurna DPR pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, Selasa (15/3/2016), di Gedung DPR, Jakarta.

Politisi Partai Gerindra ini, menerangkan bahwa substansi penting dalam strategi perlindungan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam adalah adanya jaminan resiko penangkapan ikan dan pembudidaya ikan atau usaha perikanan dalam bentuk Asuransi Kecelakaan Kerja dan Jiwa.



Ketua Komisi IV DPR Edhy Parbowo menyerahkan naskah akhir RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan

Sedangkan substansi dalam strategi pemberdayaan adalah dilakukan dengan memperhatikan keterlibatan dan peran perempuan dalam rumah tangga nelayan, rumah tangga pembudi daya ikan dan rumah tangga petambak garam melalui pemberian pelatihan dan pemagangan, pemberian beasiswa, bantuan biaya pendidikan, dan pengembangan kewirausahaan di bidang usaha perikanan atau usaha perikanan.

"Komisi IV bersama Pemerintah melakukan pembahasan secara bersama-sama. Jumlah materi yang ada dalam UU tentang UU Perlindungan, Perberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam adalah sebanyak 10 Bab dan 78 pasal. Adapun peraturan turunan dari UU ini diatur dalam satu Peraturan Pemerintah, satu Peraturan Presiden, dan tiga Peraturan Menteri," paparnya.

UU ini harus segera dilakukan sosialisasi, agar bermanfaat untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, khususnya Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

"UU tentang UU Perlindungan, Perberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, kami persembahkan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama seluruh Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, serta masyarakat Indonesia agar dapat meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Selain itu, mendorong penguatan kelembagaan dalam menjalankan usaha mandiri, produktif, maju, modern dan berkelanjutan serta mengembangkan prinsip lingkungan," pungkas Edhy Parbowo.



Tim Kunspek Komisi VIII DPR Kunjungi MAN Insan Cendekia Bengkulu

SEKOLAH AGAMA HARUS JADI PERCONTOHAN PENDIDIKAN

Sekolah agama diharapkan dapat menjadi percontohan pendidikan di Indonesia. Bahkan, sekolah agama, seperti Madrasah, diharapkan dapat berkompetisi dengan sekolah-sekolah umum, yang selama dianggap memiliki keunggulan dibanding sekolah agama.

Demikian ditegaskan Ketua Komisi VIII DPR RI Saleh Partaonan Daulay, sekaligus Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi VIII DPR RI, usai meninjau pembangunan Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia (MAN IC) di Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng), Provinsi Bengkulu, Kamis (10/03/2016).

"Mudah-mudahan MAN IC Benteng ini dapat melahirkan generasi yang tangguh, berakhlak, dan berkompetisi, sehingga tidak kalah dengan sekolah

umum lainnya, yang dianggap lebih baik. Sekolah agama, khususnya Madrasah, diharapkan juga bisa menjadi contoh pendidikan Indonesia," harap Daulay.

Politisi F-PAN itu juga berharap, MAN IC Benteng bukan hanya dimanfaatkan oleh masyarakat Bengkulu saja, tetapi juga melingkupi Sumatera Bagian Selatan. Sehingga, calon anak didik juga ada yang berasal dari luar Bengkulu.

"Jadi sekolah ini bukan hanya untuk masyarakat Bengkulu saja, juga untuk beberapa provinsi di daerah ini. Bisa dari Sumatera Selatan, Lampung, jadi bisa belajar di sini," imbuh Daulay.

Usai meninjau beberapa gedung, politisi asal dapil Sumatera Utara itu menilai, pembangunan masih di kisaran 20 persen dari total bangunan yang masih dalam tahap pembangunan oleh

Kementerian Agama. Ia berharap, pembangunan total akan selesai paling lambat dalam lima tahun mendatang.

"Jadi akan dibangun secara bertahap. Kita harapkan, 4 sampai 5 tahun mendatang, pembangunan sudah selesai. Ruang kelas, asrama dan sarana ibadah lainnya, diharapkan sudah selesai," harap Daulay.

Selama peninjauan gedung, beberapa Anggota Komisi VIII DPR RI mengkritisi pembangunan MAN IC ini. Sebagian menilai, masih ada kekurangan-kekurangan dalam pembangunan, seperti gedung yang sudah retak, letak bangunan yang terletak di dataran miring, dan perlengkapan meubelir yang kurang layak.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pendidikan Madrasah M. Nurkholis Setiawan mengatakan bahwa pada tahun 2016 ini akan ada 8 MAN IC baru yang akan beroperasi pada bulan Juli.

Selain MAIN IC Bengkulu, ada MAN IC Padang Pariaman, Batam, Pontianak, Tanah Laut Kalsel, Sorong Papua Barat, Kendari, dan Palu dengan kuota nasional akan menerima 1.275 siswa. Untuk itu, Direktorat Pendidikan Madrasah terus bekerja keras dalam menyiapkan pengoperasian MAN IC baru.

"Walau kondisi pembangunan masih 20 persen dari rencana, MAN IC Bengkulu Tengah diharapkan dapat menerima siswa sejumlah 96 orang pada tahun ajaran ini," harap Nurkholis.

Sementara itu, Pgs. Ka. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, Bustasar mengatakan, MAN IC mulai membuka pendaftaran siswa baru mulai awal Maret 2016 lalu, dan akan memulai masa sekolah Juli 2016 mendatang.

Kunjungan spesifik ini juga diikuti oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid (F-Gerindra), Anggota Komisi VIII DPR Suasana Dachi (F-Gerindra), Hidayat Nurwahid (F-PPS), Muslich (F-PPP), dan Endang Srikarti Handayani (F-PG).



BERITA BERGAMBAR



Panja RUU KUHP Komisi III DPR dipimpin Benny K. Harman berdialog dengan Kapolda Kalimantan Barat, untuk menghimpun masukan revisi UU KUHP. Rabu, 9/3/2016 foto : husen/hr



Tim Kunjungan Spesifik Komisi VIII DPR RI bertukar cinderamata dengan Gubernur Jambi Kamis, 10/3/2016 foto : suci/hr



Tim Kunjungan Spesifik Komisi VIII DPR RI meninjau fasilitas BPBD Provinsi Bengkulu, Kamis (10/3/2016) foto : sofyant/hr



Kunjungan kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI pantau Kesiapsiagaan BPBD Sulut, dalam menanggulangi bencana banjir bandang di Manado, Sulawesi Utara. Kamis, (10/3/2016) foto : andri/hr



Tim Kunker Spesifik Komisi VIII DPR RI mengunjungi Pulau Bangka, Provinsi Bangka Belitung guna meninjau tempat yang mengalami kerusakan. Kamis, (10/3/2016) foto : riska/hr

